AJIR: Aceh Journal of Islamic Research
Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2026): 22-43
https://seuramoe.id/index.php/ajir/index

Kontestasi Dayah dan Pendidikan Umum di Aceh; Upaya Membangun Keseimbangan Kompetensi Religius dan Akademik

Yusba Alhamda Syari
SDIT Al-Marhamah Langsa, Aceh, Indonesia
yusbasyari62@guru.sd.belajar.id

Submission	Accepted	Published
Nov 23, 2025	Nov 24, 2025	Feb 27, 2026

Abstract

Ideally, Islamic educational institutions in Aceh—particularly dayah—should coexist synergistically with general education to develop students' religious and academic competencies in a balanced manner. However, in reality, both systems often operate in parallel and sometimes in contestation, resulting in gaps in competency integration and inconsistency in educational outcomes. This study aims to analyze the dynamics of contestation between dayah and general education in Aceh and to formulate a model that bridges these two educational domains. Employing a qualitative literature-based method, this research draws on primary sources from contemporary studies on integrated Islamic education and secondary sources consisting of books, journal articles, and relevant policy documents. The findings indicate that while both systems share the vision of producing competent and morally grounded learners, structural, curricular, and sociocultural disparities remain significant obstacles. The study concludes that integration requires not only curricular alignment but also institutional collaboration, contextual innovation, and a shared paradigm of holistic education. This research contributes by offering a conceptual framework that strengthens the balance between religious and academic competencies within Aceh's dual educational landscape.

Keywords: *Dayah, General Education, Aceh, Competency Integration*

Abstrak

Idealnya, sistem pendidikan Aceh mampu menghadirkan keselarasan antara tradisi keilmuan dayah yang berakar kuat pada nilai-nilai keislaman dengan pendidikan umum yang menekankan kompetensi akademik modern. Namun, realitas menunjukkan bahwa kedua arus pendidikan tersebut masih berjalan dalam ruang epistemik yang berbeda, sehingga menimbulkan kontestasi

dalam orientasi, metode, dan capaian pembelajaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kontestasi tersebut serta merumuskan pola keseimbangan kompetensi religius–akademik yang relevan bagi pengembangan pendidikan Aceh kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengkaji literatur terkait transformasi dayah, integrasi kurikulum, dan dinamika pendidikan Islam modern. Analisis dilakukan melalui teknik kategorisasi tematik, komparasi literatur, dan penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontestasi muncul terutama pada perbedaan paradigma keilmuan, struktur kurikulum, dan orientasi keluaran pendidikan; namun integrasi keduanya menjadi mungkin melalui rekonstruksi kurikulum, penguatan kompetensi guru, dan model tata kelola yang kolaboratif antara dayah dan sekolah umum. Dengan demikian, keseimbangan kompetensi religius dan akademik dapat diwujudkan melalui desain pendidikan hibrida yang responsif terhadap kebutuhan sosial budaya Aceh dan tuntutan abad 21.

Kata kunci: Dayah, Pendidikan Umum, Integrasi Kurikulum, Aceh

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu penopang utama pembangunan sosial dan budaya suatu wilayah, termasuk Aceh yang memiliki sejarah panjang keberagamaan dan kemandirian intelektual. Sebagai daerah yang dikenal dengan identitas keislamannya yang kuat, Aceh telah melahirkan berbagai lembaga pendidikan tradisional seperti dayah yang menjadi pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman selama berabad-abad (Karimuddin, 2017). Dalam perkembangannya, modernisasi sistem pendidikan nasional mendorong hadirnya sekolah umum dengan kurikulum akademik yang lebih terstruktur dan kompetitif. Interaksi antara dua sistem pendidikan ini membentuk dinamika yang unik, karena keduanya berupaya menjawab kebutuhan masyarakat Aceh yang semakin kompleks (Erawadi & Setiadi, 2024). Di satu sisi, dayah mempertahankan karakter tradisional dan otoritatif dalam ajaran agama. Di sisi lain, sekolah umum menghadirkan pendekatan rasional, berbasis sains, dan terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Perjumpaan dua arus ini memunculkan sebuah diskursus menarik mengenai bagaimana masyarakat menilai relevansi, keunggulan, dan masa depan kedua lembaga tersebut. Dalam konteks inilah, kontestasi antara pendidikan dayah dan pendidikan umum menjadi perbincangan yang tidak dapat dihindari, terutama ketika tuntutan global dan lokal bergerak semakin cepat dan saling memengaruhi.

Di Aceh, kontestasi ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan epistemologis. Dayah, yang identik dengan disiplin ilmu agama, adab, dan pembentukan karakter spiritual, masih menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga yang ingin menanamkan nilai-nilai religius yang kuat pada anak-anak mereka (Razali et al., 2024). Namun, sekolah umum menawarkan jalur akademik yang membuka akses menuju pendidikan tinggi, karier profesional, serta

kemampuan adaptif di tengah derasnya arus globalisasi. Masyarakat Aceh kini berada pada persimpangan: mereka menginginkan anak-anak yang religius, tetapi juga memiliki kompetensi akademik yang memadai untuk bersaing di tingkat nasional dan global. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah kedua sistem pendidikan ini harus terus berkompetisi, atau justru dapat saling melengkapi? Beberapa upaya integrasi telah muncul, seperti modernisasi kurikulum dayah, penambahan mata pelajaran umum, serta penguatan nilai-nilai religius di sekolah umum. Namun, implementasi integrasi tersebut belum berjalan secara konsisten dan merata. Hal ini membuka ruang bagi penelitian untuk melihat lebih dekat bagaimana masyarakat Aceh memahami, menilai, dan menavigasi kontestasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Idealnya, pendidikan di Aceh mampu menghadirkan sebuah ekosistem yang seimbang antara penguasaan ilmu agama dan kecakapan akademik. Anak-anak diproyeksikan tumbuh sebagai generasi yang saleh, kritis, cerdas, dan siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas keislaman mereka. Namun realitasnya, kontestasi antara dayah dan pendidikan umum masih berlangsung dalam bentuk dikotomi yang cukup tajam. Dayah kerap dipersepsikan unggul dalam ranah religius, tetapi lemah dalam kompetensi akademik. Sebaliknya, sekolah umum dianggap unggul dalam sains dan teknologi, tetapi dinilai kurang dalam pembinaan moral dan spiritual. Ketidakseimbangan persepsi dan praktik ini menciptakan gap pendidikan di tingkat keluarga, lembaga, dan kebijakan. Masalah utama penelitian ini terletak pada bagaimana kedua sistem ini diposisikan, dipahami, dan dijalankan dalam masyarakat Aceh, serta bagaimana strategi membangun keseimbangan kompetensi religius-akademik dapat dirumuskan secara lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontestasi antara dayah dan pendidikan umum di Aceh secara mendalam, dengan menelaah dinamika sosial, institusional, dan epistemologis yang memengaruhinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan model keseimbangan yang dapat mengintegrasikan kompetensi religius dan akademik tanpa menghilangkan identitas masing-masing lembaga. Kontribusi penelitian ini ialah menghadirkan perspektif baru mengenai integrasi dua sistem pendidikan yang selama ini diposisikan dalam kerangka dikotomis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang hubungan antara pendidikan tradisional dan pendidikan modern di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan, lembaga pendidikan, dan masyarakat Aceh untuk membangun desain pendidikan yang lebih harmonis, relevan, dan berkelanjutan.

Literature Review

Kajian terkait kontestasi antara Dayah dan pendidikan umum di Aceh, khususnya dalam upaya membangun keseimbangan antara kompetensi religius dan akademik, bukanlah isu baru dalam khazanah pendidikan Islam. Sejumlah peneliti telah mengangkat tema ini dengan pendekatan historis, sosiologis, maupun pedagogis. Namun demikian, dinamika antara dua sistem pendidikan tersebut terus berkembang, sehingga ruang analisis tetap terbuka untuk melihat bagaimana kontestasi ini membentuk identitas pendidikan Aceh kontemporer.

Dengan menelaah beberapa karya relevan, dapat dipahami bagaimana titik temu dan titik tegang antara pendidikan tradisional dan pendidikan modern dibingkai oleh berbagai perspektif ilmiah.

Pertama, M. Fajar Sidik et al., dalam karya berjudul "Conceptualization of the Integrated Islamic Religious Education Curriculum: A Literature Study at Imam Hatip Schools Turkey and MAN Insan Cendekia Indonesia", membahas model integrasi kurikulum agama dan sains melalui studi literatur terhadap dua lembaga pendidikan modern berbasis keislaman. Tulisan ini menunjukkan bahwa integrasi kurikulum dapat menghasilkan profil lulusan yang seimbang antara kompetensi spiritual, akademik, dan keterampilan abad ke-21. Temuan utama penelitian ini adalah perlunya desain kurikulum yang fleksibel, berbasis riset, dan mampu menjembatani epistemologi agama dan sains (M. Fajar Sidik et al., 2024). Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada fokus integrasi pendidikan agama dan akademik. Namun, perbedaannya terletak pada konteks: karya tersebut mengulas sekolah modern nasional-internasional, sedangkan kajian penulis menyoroti kontestasi unik antara Dayah, lembaga tradisional Aceh, dan sekolah umum dalam konteks lokal yang khas.

Selanjutnya, Erawadi dan Fadlan Masykura Setiadi, melalui artikel "Transformation of Traditional Islamic Education: Dayah as a Modern Educational Institution in Post-Conflict Aceh", menawarkan analisis mendalam tentang perubahan Dayah pascakonflik Aceh. Karya ini menyoroti bagaimana Dayah mengalami modernisasi dalam aspek tata kelola, kurikulum, dan fasilitas, tanpa meninggalkan identitas religiusnya. Temuan mereka menegaskan bahwa transformasi ini merupakan respons adaptif terhadap tuntutan masyarakat dan kebutuhan kompetensi masa kini (Erawadi & Setiadi, 2024). Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap Dayah sebagai lembaga pendidikan yang bernegosiasi dengan modernitas. Adapun perbedaannya, karya ini lebih menekankan aspek transformasi internal Dayah, sedangkan penelitian penulis menyoroti relasi komplementer maupun kompetitif Dayah terhadap sekolah umum sebagai dua entitas yang saling memengaruhi.

Di sisi lain, Ahmad Musaddad et al., dalam artikel "Konvergensi Kurikulum Pendidikan Agama dan Sekuler dalam Pendidikan Islam di Indonesia: Analisis Literatur", menguraikan proses pertemuan antara kurikulum agama dan kurikulum sekuler dalam konteks pendidikan Islam secara nasional. Karya ini menunjukkan bahwa konvergensi terjadi melalui penguatan mata pelajaran agama, integrasi nilai-nilai Islam dalam pelajaran umum, serta pembaruan kompetensi guru. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga pedagogis (Musaddad et al., 2025). Kesamaannya dengan kajian penulis berada pada tema besar integrasi kompetensi religius dan akademik. Meski demikian, perbedaannya cukup signifikan: penelitian Musaddad et al. mengambil perspektif nasional dan institusi modern, sedangkan kajian penulis membahas konvergensi tersebut dalam konteks kontestasi lokal yang spesifik di Aceh.

Terakhir, Vino Sukmana Huda et al., melalui artikel "Integrasi Pendidikan Islam dan Sain dalam Dunia Pesantren di Era 4.0", mengkaji bagaimana pesantren beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kompetensi abad 21. Tulisan ini menemukan bahwa pesantren mampu mengintegrasikan pembelajaran

sains dan teknologi melalui inovasi kurikulum, pembelajaran berbasis digital, serta peningkatan kapasitas ustaz/guru (Huda et al., 2025). Kesamaan dengan kajian penulis terletak pada fokus integrasi pengetahuan religius dan sains. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan konteks: penelitian tersebut membahas pesantren era 4.0 secara umum, sementara kajian penulis menitikberatkan pada Dayah Aceh yang secara historis, budaya, dan epistemologis memiliki karakter sangat khas.

Dari keseluruhan karya tersebut, tampak jelas bahwa studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti integrasi pendidikan Islam-modern dalam konteks sekolah model, pesantren modern, atau konvergensi kurikulum secara nasional. Namun, gap penelitian muncul pada titik di mana Dayah Aceh dengan sejarah panjang, otoritas keagamaan yang kokoh, serta karakter kultural yang unik berhadapan secara langsung maupun simbolik dengan pendidikan umum modern di Aceh. Belum banyak penelitian yang membahas kontestasi epistemologis, kompetisi legitimasi sosial, serta negosiasi otoritas akademik dan religius antara kedua lembaga tersebut. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menyoroti integrasi kurikulum, tetapi belum mendalami bagaimana kontestasi ini memengaruhi pembentukan profil kompetensi siswa, dinamika sosial pendidikan, serta arah kebijakan pendidikan daerah. Dengan demikian, kajian ini menawarkan kontribusi baru yang lebih kontekstual dan mendalam, sekaligus memperkaya wacana mengenai relasi antara pendidikan tradisional dan pendidikan modern di Aceh.

Metodologi Penelitian

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara mendalam pola kontestasi, titik temu, serta ketegangan epistemologis antara pendidikan Dayah dan pendidikan umum di Aceh. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana dua tradisi pendidikan tersebut membangun atau justru gagal membangun keseimbangan antara kompetensi religius dan akademik dalam konteks sosial Aceh kontemporer. Dengan karakteristik kajian pustaka yang menekankan eksplorasi konseptual dan analisis komparatif, penelitian ini memadukan berbagai sumber ilmu untuk menyusun pemahaman komprehensif tentang dinamika dualisme pendidikan tersebut.

Metodologi yang digunakan meliputi proses pengumpulan, seleksi, klasifikasi, dan analisis literatur yang relevan, baik berupa jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, dokumen pemerintah, maupun laporan penelitian terkait Dayah, pendidikan modern, integrasi kurikulum, serta transformasi kelembagaan pendidikan Islam. Sumber primer penelitian mencakup empat karya ilmiah utama yang secara langsung membahas integrasi pendidikan Islam, modernisasi lembaga tradisional, dan konvergensi kurikulum (Sidik et al., 2024; Erawadi & Setiadi, 2024; Musaddad et al., 2025; Huda et al., 2025). Sementara itu, sumber sekunder terdiri atas artikel pendukung, laporan kebijakan, dokumen sejarah pendidikan Aceh, serta penelitian-penelitian serupa di konteks negara Muslim lainnya.

Analisis data dilakukan melalui teknik content analysis dengan langkah

mereduksi data, mengelompokkan tema, membangun kategori konseptual, dan menyusun sintesis temuan. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, pembacaan berulang, dan cross-check antar literatur untuk memastikan konsistensi dan reliabilitas pemaknaan. Proses penyusunan draft naskah dilakukan melalui beberapa tahap: konstruksi kerangka konseptual, penyusunan argumen berbasis temuan literatur, penulisan terstruktur sesuai standar publikasi ilmiah, serta revisi berlapis untuk menjaga koherensi, akurasi referensi, dan ketajaman analisis.

Sejarah, Identitas, dan Perkembangan Institusional Dayah serta Pendidikan Umum di Aceh

Sejarah perkembangan pendidikan di Aceh tidak dapat dilepaskan dari napas keislaman yang telah mengakar sejak abad ke-13. Dayah sebagai institusi pendidikan tertua di Aceh muncul sebagai pusat transmisi pengetahuan keagamaan dan pembentukan karakter masyarakat Muslim, jauh sebelum konsep sekolah formal Barat diperkenalkan pada masa colonial (Karimuddin, 2017). Lembaga-lembaga awal seperti Dayah Cot Kala, Dayah Teungku Chik di Tiro, hingga pusat intelektual Islam di Samudera Pasai menjadi fondasi epistemik yang membentuk identitas kolektif masyarakat Aceh. Dalam konteks ini, dayah bukan hanya pusat belajar, tetapi juga pusat produksi ulama, penggerak sosial, dan benteng moral (Subakat, 2018). Sistem pendidikan umum yang kemudian diperkenalkan melalui kolonial Belanda membawa model yang sangat berbeda berbasis rasionalitas modern, sekuler, dan administratif sehingga sejak awal hubungan antara dayah dan pendidikan umum berada dalam corak kontestasi epistemik yang panjang.

Identitas dayah sebagai lembaga tradisional tetap terjaga karena ia bertumpu pada otoritas keilmuan ulama, transmisi kitab kuning, dan pola relasi guru–murid yang bersifat personal-spiritual. Dalam sistem ini, pengetahuan keagamaan tidak sekadar dipelajari secara tekstual, tetapi dihayati dalam praktik keseharian. Hal ini menjadikan dayah sebagai lembaga yang memiliki kekhasan yang sulit digantikan oleh pendidikan umum yang cenderung berorientasi administratif dan seragam secara kurikulum nasional. Identitas historis ini juga membuat dayah menjadi simbol kemandirian budaya Aceh, terutama dalam menghadapi modernisasi yang sering kali membawa tuntutan standar kompetensi baru. Ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas menjadi bagian penting dari narasi perkembangan pendidikan Aceh hingga saat ini.

Pendidikan umum di Aceh mulai berkembang secara sistematis pada awal abad ke-20 ketika kolonial Belanda membangun sekolah-sekolah rakyat dan khusus. Sistem pendidikan modern ini membawa paradigma baru mengenai ilmu pengetahuan dan metodologi pembelajaran (Arifin et al., 2025). Namun, perkembangan tersebut berjalan paralel dan tidak sepenuhnya menyentuh masyarakat pedalaman Aceh, yang saat itu tetap mempertahankan struktur dayah sebagai rujukan utama pendidikan. Setelah kemerdekaan, pendidikan umum mengalami ekspansi besar seiring kebijakan nasional, sehingga sekolah dasar, menengah, dan atas modern menjangkau seluruh kabupaten. Perubahan ini membawa harapan integrasi ilmu pengetahuan modern, tetapi juga menimbulkan

fragmentasi epistemik antara pendidikan umum yang berorientasi akademik dan dayah yang fokus pada agama.

Pada periode pascakonflik Aceh (pasca-MoU Helsinki 2005), dinamika antara dayah dan pendidikan umum mengalami transformasi signifikan. Pemerintah Aceh melalui kewenangan otonomi khusus mulai merumuskan kebijakan afirmatif bagi dayah, termasuk pembentukan Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah (BPPD) yang bertugas meningkatkan kualitas kelembagaan dan kurikulum dayah (Inayatillah, 2022). Langkah ini memperkuat posisi dayah sebagai lembaga resmi dalam sistem pendidikan Aceh, bukan lagi sekadar lembaga tradisional. Kebijakan ini membuka ruang dialog antara dua sistem pendidikan yang sebelumnya berjalan terpisah, terutama dalam bidang kurikulum, sertifikasi, dan pengakuan formal lulusan.

Meski demikian, perbedaan epistemik antara dayah dan pendidikan umum tetap menjadi isu strategis yang tidak mudah dijembatani. Dayah mempertahankan pendekatan pembelajaran berbasis kitab turats, hafalan, dan talaqqi yang menekankan kedalaman makna sementara pendidikan umum menuntut struktur kurikulum yang terukur, pencapaian akademik, dan literasi sains. Ketegangan ini menciptakan ruang kontestasi dalam persepsi publik: dayah sering dipandang lemah dalam aspek akademik modern, sementara pendidikan umum dianggap kurang sensitif terhadap nilai religius dan moral. Persoalan ini memunculkan kebutuhan integrasi yang lebih sistemik agar kompetensi religius dan akademik dapat berjalan beriringan tanpa menghilangkan identitas masing-masing.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa banyak dayah telah melakukan modernisasi internal dengan mengadopsi mata pelajaran umum seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa Inggris, dan teknologi informasi. Modernisasi ini bukan sekadar penyesuaian kurikulum, tetapi juga bentuk respons terhadap tuntutan globalisasi dan kebutuhan kompetensi abad ke-21 (Buto & Hafifuddin, 2022). Di sisi lain, sekolah umum di Aceh memberikan ruang lebih besar bagi pelajaran keagamaan, praktik ibadah, dan pembiasaan Islam sesuai konteks masyarakat Aceh. Dua arah pergerakan ini menunjukkan adanya "titik temu epistemik" yang potensial untuk mendorong integrasi pendidikan Aceh yang lebih seimbang.

Meski terjadi perkembangan integratif, persoalan kualitas guru, infrastruktur, dan kebijakan masih menjadi tantangan utama. Dayah menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yang ahli dalam mata pelajaran umum, sementara sekolah umum menghadapi tantangan dalam menginternalisasi nilai-nilai religius secara autentik, tidak sebatas formalitas kurikulum. Kebijakan pemerintah kadang tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan lapangan, sehingga daya dukung institusional belum optimal. Pada titik ini, dialog kebijakan antara ulama, pendidik, pemerintah, dan akademisi menjadi kunci untuk merumuskan strategi integrasi yang tepat.

Secara identitas, dayah tetap menjadi rujukan moral masyarakat Aceh, tetapi di tengah arus modernisasi, lembaga ini juga dituntut menghasilkan lulusan yang kompetitif secara akademik (Azhari & Jailani, 2023). Tuntutan ganda ini menciptakan tekanan internal pada struktur dayah untuk melakukan reformasi manajemen, pembelajaran, dan evaluasi. Identitas spiritual tidak boleh hilang,

tetapi kompetensi akademik harus diperkuat. Lembaga-lembaga dayah besar seperti Dayah Darul Ihsan, Oemar Diyan, Raudhatul Hasanah, dan lainnya telah menunjukkan bahwa modernisasi dapat dikelola tanpa kehilangan akar identitas. Pengalaman mereka dapat menjadi model bagi dayah lain yang sedang melakukan transformasi institusional (Solichin, 2015).

Di sisi lain, sekolah umum di Aceh menghadapi tantangan besar dalam membangun integritas moral peserta didik. Pengaruh digitalisasi, perubahan gaya hidup, serta melemahnya kontrol sosial membuat institusi pendidikan umum perlu memperkuat pembinaan karakter berbasis nilai keislaman dan kearifan lokal. Di sinilah dayah dan sekolah umum sebenarnya memiliki potensi kolaborasi: dayah kuat dalam pembinaan karakter spiritual, sementara sekolah umum kuat dalam literasi modern. Kerja sama ini dapat melahirkan model pendidikan khas Aceh yang menjadi keunggulan kompetitif daerah.

Dalam perspektif teoritis, kontestasi dayah dan pendidikan umum di Aceh dapat dipahami sebagai bagian dari "pertarungan epistemik" antara tradisi ilmu Islam dan modernitas pendidikan Barat. Pertarungan ini tidak selalu berarti konflik, tetapi dapat menjadi proses dialektika kreatif yang melahirkan sistem pendidikan baru yang lebih adaptif. Setiap institusi memiliki modal simbolik: dayah dengan otoritas keagamaannya, dan pendidikan umum dengan legitimasi akademik formal. Integrasi dua modal ini berpotensi melahirkan generasi Aceh yang unggul secara spiritual, cerdas secara intelektual, dan tangguh secara sosial.

Upaya formal untuk mengintegrasikan dua sistem pendidikan ini tampak dalam berbagai kebijakan seperti pengembangan kurikulum dayah terpadu, pelatihan guru lintas sistem, standar mutu lembaga, dan pembukaan kelas-kelas keterampilan di dayah. Namun integrasi sejati tidak hanya bergantung pada kebijakan, melainkan juga pada perubahan paradigma dalam melihat fungsi pendidikan. Pendidikan seharusnya tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, tetapi memandang keduanya sebagai satu kesatuan untuk membentuk manusia merdeka yang beriman, berilmu, dan beradab (Utari et al., 2025). Paradigma ini juga sejalan dengan gagasan pendidikan Islam klasik yang memandang ilmu sebagai satu kesatuan yang integral.

Ke depan, tantangan terbesar Aceh adalah merumuskan model pendidikan berkarakter ganda yang mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa mengorbankan identitas budaya. Dayah harus terus memperkuat kapasitas akademiknya, sementara pendidikan umum perlu memperdalam dimensi moral-spiritualnya. Kolaborasi, bukan kompetisi, harus menjadi arah baru hubungan kedua institusi. Jika pola ini dapat diwujudkan, Aceh berpeluang menjadi daerah dengan model pendidikan integratif yang menjadi rujukan nasional—sebuah sistem yang menyeimbangkan religiusitas yang kuat dengan kompetensi akademik yang unggul, serta melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri.

Kontestasi Kurikulum: Pendalaman Ilmu Keagamaan versus Tuntutan Kompetensi Akademik Modern

Dalam konteks pendidikan kontemporer, kontestasi antara pendalaman ilmu keagamaan dan tuntutan kompetensi akademik modern menjadi isu strategis

yang melintasi batas institusi dan wilayah. Ketegangan tersebut bukan semata perbedaan orientasi kurikulum, tetapi mencerminkan benturan dua paradigma besar: tradisi keilmuan berbasis spiritualitas dan moralitas keagamaan dengan rasionalitas pendidikan modern yang menekankan literasi sains, teknologi, dan kompetensi abad ke-21. Ketika kedua paradigma ini berhadapan, ruang pendidikan menjadi arena negosiasi identitas, nilai, dan orientasi masa depan peserta didik. Kontestasi ini semakin mengemuka di wilayah dengan basis tradisi Islam kuat seperti Aceh, di mana lembaga dayah dan sekolah umum memiliki orientasi kurikulum yang berbeda namun bersinggungan dalam praktik.

Pendalaman ilmu keagamaan dalam tradisi pendidikan Islam klasik berakar pada studi kitab turats, pembacaan mendalam teks-teks syariah, serta disiplin moral yang terbentuk melalui relasi guru–murid yang intensif. Kurikulum keagamaan tradisional tidak hanya mengajarkan pengetahuan normatif, tetapi juga membentuk karakter, adab, dan identitas spiritual yang menjadi fondasi masyarakat Muslim (Musaddad et al., 2025). Model pembelajaran talaqqi, sorogan, dan musyawarah kitab memberikan ruang internalisasi nilai dengan kedalaman yang tidak selalu dapat dicapai dalam pendidikan modern yang serba terstruktur (Nasution et al., 2019). Namun, kedalaman keagamaan ini sering kali dituduh kurang relevan dengan tuntutan dunia kerja modern, sehingga memunculkan stigma bahwa lulusan lembaga keagamaan tidak memiliki kompetensi akademik dan keterampilan teknis yang memadai.

Sebaliknya, pendidikan umum modern dibangun atas landasan prinsip efektivitas pedagogis, penguasaan kompetensi minimal, serta standar akademik yang dapat diukur melalui asesmen nasional maupun global. Kurikulum berbasis sains, teknologi, matematika, dan literasi digital dianggap sebagai fondasi penting bagi kemajuan bangsa di era global (Anjaludin & Pratama, 2025). Namun perkembangan ini tidak sepenuhnya netral secara ideologis. Pengutamaan kompetensi teknis tanpa keseimbangan nilai spiritual dapat menghasilkan peserta didik yang unggul secara kognitif tetapi rapuh secara moral dan emosional. Dalam konteks Aceh, misalnya, masalah degradasi karakter menjadi salah satu kritik utama terhadap pendidikan umum yang dinilai tidak memiliki kedalaman pembinaan nilai seperti yang terdapat di dayah (Idris, 2020).

Kontestasi kurikulum antara kedua paradigma ini semakin tampak ketika negara mulai menstandarkan pendidikan nasional melalui kurikulum-kurikulum baru seperti Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, dan berbagai instrumen evaluasi yang bersifat seragam. Standarisasi ini sering dipandang tidak kompatibel dengan kurikulum dayah yang lebih organik, fleksibel, dan berbasis tradisi intelektual Islam. Padahal, standarisasi akademik bertujuan memastikan kualitas minimal pendidikan di seluruh negeri. Namun bagi dayah, penerapan standar nasional terkadang dianggap mengancam otonomi epistemik dan identitas keilmuan yang telah dipertahankan selama berabad-abad. Di sinilah muncul dilema: bagaimana mempertahankan tradisi keagamaan tanpa menghambat kemampuan peserta didik dalam menghadapi tantangan global.

Dinamika kontestasi tersebut juga terkait erat dengan perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Tuntutan terhadap keterampilan kerja, mobilitas sosial, dan akses ke pendidikan tinggi modern mendorong banyak keluarga menginginkan pendidikan berbasis sains dan teknologi bagi anak-anak mereka.

Namun di sisi lain, kekhawatiran terhadap krisis moral dan degradasi nilai membuat pendidikan keagamaan tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat Aceh. Kondisi ini menciptakan pola "pendulum ganda": masyarakat ingin anaknya religius sekaligus akademik, tetapi sistem kurikulum yang ada belum sepenuhnya mampu memenuhi dua tuntutan tersebut dalam satu model pendidikan yang terpadu dan berimbang.

Upaya integrasi kurikulum keagamaan dan akademik modern sebenarnya telah dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk dayah terpadu, madrasah unggulan, hingga sekolah umum berbasis karakter (N. Ali, 2020). Namun integrasi ini bukan tanpa tantangan. Dari sisi kurikulum, penyelarasan antara kitab turats dan mata pelajaran modern membutuhkan pendekatan epistemologis baru yang mampu menjembatani teks klasik dengan realitas kontemporer. Dari sisi kelembagaan, integrasi memerlukan peningkatan kapasitas guru yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga pedagogi modern dan teknologi pembelajaran. Tanpa sumber daya manusia yang memadai, integrasi kurikulum hanya akan bersifat kosmetik sekadar menambah mata pelajaran tanpa menyentuh perubahan paradigma pembelajaran (M. Fajar Sidik et al., 2024).

Kontestasi kurikulum juga tampak pada aspek penilaian (assessment). Pendidikan keagamaan biasanya menekankan penilaian proses, keberkahan ilmu, dan kualitas akhlak, sementara pendidikan modern lebih menekankan asesmen sumatif, standar kompetensi, dan pencapaian kognitif yang terukur. Perbedaan cara pandang ini menciptakan jarak dalam menentukan indikator keberhasilan pendidikan. Ketika kedua sistem dipaksa untuk berintegrasi tanpa kompromi, muncul ketidaksesuaian antara tujuan, metode pembelajaran, dan output yang diharapkan. Tantangan inilah yang membuat banyak lembaga integratif di Aceh masih berjuang menemukan formula kurikulum yang benar-benar seimbang.

Dalam realitas global saat ini, perubahan teknologi digital turut memperbesar ketegangan antara kurikulum keagamaan dan akademik modern. Sementara dayah berupaya menjaga kesahajaan tradisi belajar, pendidikan modern menuntut penggunaan teknologi sebagai bagian dari kompetensi dasar (Huda et al., 2025). Namun fakta sosial menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat dihindari. Karena itu, integrasi literasi digital dalam kurikulum keagamaan menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan, tanpa menghilangkan kedalaman spiritualitas yang menjadi ciri khas dayah. Tantangan terbesar adalah bagaimana memanfaatkan teknologi untuk memperkuat nilai, bukan merusaknya.

Analisis kontemporer menunjukkan bahwa kontestasi kurikulum tidak hanya persoalan isi, tetapi juga persoalan paradigma. Ilmu agama dan ilmu modern sering diperlakukan sebagai dua hal yang sepenuhnya terpisah, padahal sejarah intelektual Islam menunjukkan bahwa para ulama klasik menguasai berbagai disiplin ilmu secara holistik. Ketika kurikulum modern memisahkan secara kaku ilmu agama dari sains, lahir jurang epistemik yang membuat peserta didik tidak mampu memahami hubungan antara iman, akal, dan realitas sosial (Arifin et al., 2025). Oleh karena itu, rekonseptualisasi kurikulum perlu dilakukan, bukan sekadar menambah mata pelajaran, tetapi membangun narasi baru tentang kesatuan ilmu ('wahdat al-'ilm).

Salah satu pendekatan yang mulai berkembang adalah model kurikulum integratif-holistik yang menggabungkan nilai keagamaan dengan penguatan

akademik secara proporsional. Model ini menuntut kolaborasi antara ulama, akademisi, pemerintah, dan praktisi pendidikan untuk merumuskan desain kurikulum yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan global, tetapi juga sejalan dengan identitas budaya dan keagamaan masyarakat. Pendekatan ini juga menekankan pembelajaran berbasis proyek, kontekstual, dan riset, sehingga peserta didik dapat melihat hubungan langsung antara nilai agama dan solusi atas masalah-masalah modern seperti lingkungan, ekonomi, dan teknologi (N. Ali, 2019).

Meski model integratif mulai berkembang, resistensi tetap muncul baik dari kalangan tradisionalis maupun modernis. Kaum tradisionalis khawatir modernisasi akan mengikis otoritas ulama dan menghilangkan kedalaman kitab kuning, sedangkan kalangan modernis menganggap pendalaman agama berpotensi mengurangi produktivitas akademik. Kontestasi ini sebenarnya mencerminkan kecemasan kedua belah pihak terhadap kehilangan identitas. Namun bila dilihat secara strategis, integrasi kurikulum justru dapat memperkaya tradisi keilmuan Islam, sekaligus menyiapkan peserta didik agar relevan dalam dunia kerja dan masyarakat global yang dinamis.

Otoritas Keilmuan Ulama Dayah dan Guru Pendidikan Umum dalam Persepsi dan Pilihan Masyarakat Aceh

Dalam masyarakat Aceh, otoritas keilmuan selalu menjadi bagian integral dalam menentukan kepercayaan, orientasi pendidikan, dan pilihan sosial masyarakat (Nasution et al., 2019). Dua figur yang menonjol dalam konstruksi otoritas tersebut adalah ulama dayah dan guru pendidikan umum. Keduanya mewakili dua sistem produksi pengetahuan yang berbeda, meski berada dalam ruang sosial yang sama. Ulama dayah mengakar dalam tradisi pendidikan Islam klasik yang menekankan spiritualitas, moralitas, dan penguasaan kitab-kitab syariah, sementara guru pendidikan umum berfungsi sebagai agen modernisasi yang mentransmisikan sains dan literasi global. Ketegangan sekaligus sinergi antara kedua otoritas ini menciptakan dinamika sosial yang unik dalam masyarakat Aceh, menjadikan isu otoritas keilmuan sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan arah pendidikan dan pembentukan identitas generasi muda (Azhari & Jailani, 2023).

Secara historis, ulama dayah memperoleh otoritas bukan hanya karena kapasitas intelektualnya, tetapi juga karena kedalaman spiritual, keteladanan, dan rekam jejak perjuangan sosialnya. Dayah telah lama berfungsi sebagai pusat intelektual, spiritual, dan bahkan politik, terutama pada masa kerajaan Islam dan masa perjuangan melawan kolonialisme (Razali et al., 2024). Otoritas ulama terbangun melalui legitimasi moral dan jaringan keilmuan yang ditransmisikan dari generasi ke generasi. Masyarakat Aceh memandang ulama sebagai pewaris ilmu Nabi dan penjaga moralitas kolektif, sehingga kepercayaan kepada mereka sangat kuat. Identitas ini sudah tertanam jauh sebelum munculnya pendidikan formal modern, membuat posisi ulama dayah tetap kokoh meskipun sistem pendidikan modern berkembang pesat.

Sementara itu, guru pendidikan umum tampil sebagai figur otoritatif dalam konteks modern yang sarat tuntutan kompetensi akademik dan keterampilan

teknologi. Guru sekolah umum dinilai mewakili rasionalitas, kemajuan sains, dan peluang mobilitas sosial. Melalui interaksi dengan kurikulum nasional, mereka menjadi agen integrasi Aceh ke dalam sistem pengetahuan global (Musaddad et al., 2025). Peran mereka semakin strategis ketika pendidikan menjadi syarat utama dalam memasuki dunia kerja modern. Dalam hal ini, guru pendidikan umum memperoleh otoritas melalui profesionalitas, sertifikasi, dan legitimasi negara. Namun, meski memiliki kedudukan penting, persepsi masyarakat Aceh terhadap mereka sering kali bersifat pragmatis—lebih terkait pada kebutuhan ekonomi dan masa depan anak, bukan pada kedalaman moral sebagaimana yang dilekatkan pada ulama dayah.

Dalam realitas sosial Aceh kontemporer, pilihan masyarakat terhadap ulama dayah atau guru pendidikan umum tidak hanya ditentukan oleh preferensi keilmuan, tetapi juga oleh konstruksi identitas sosial budaya. Bagi komunitas pedesaan, ulama dayah dianggap lebih relevan karena tradisi dayah telah menjadi fondasi kehidupan religius mereka (Erawadi & Setiadi, 2024). Di sisi lain, komunitas urban atau semi-urban lebih banyak mengandalkan guru pendidikan umum sebagai rujukan utama, terutama karena orientasi mereka yang lebih modern dan berfokus pada peluang ekonomi. Namun, preferensi ini bukanlah dikotomi yang kaku; banyak keluarga Aceh justru menggabungkan keduanya sebagai strategi pendidikan ganda, dayah untuk membentuk akhlak dan spiritualitas, sekolah umum untuk mempersiapkan kompetensi akademik dan karier (N. Ali, 2020).

Otoritas ulama dayah juga diperkuat oleh relasi emosional dan pola interaksi intensif antara santri dan teungku. Sistem halaqah, pengajian, dan pengasuhan langsung menciptakan hubungan yang lebih personal dan mendalam. Aspek keikhlasan, keberkahan ilmu, dan kedekatan spiritual menjadi elemen penting dalam persepsi masyarakat. Karena itu, ulama dayah tidak hanya dihormati karena ilmunya, tetapi juga karena dianggap mampu menjadi pembimbing dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah sosial, keluarga, dan bahkan politik (Imawan, 2022). Fenomena ini berbeda signifikan dengan guru pendidikan umum, yang meski dihormati, umumnya berfungsi dalam ruang profesional yang lebih terbatas dan tidak memiliki relasi spiritual yang serupa dengan peserta didik.

Meski demikian, masyarakat Aceh juga memberi nilai tinggi pada guru pendidikan umum sebagai figur pembaharu. Keahlian mereka dalam mengajarkan matematika, sains, literasi digital, dan keterampilan abad ke-21 dipandang sebagai modal penting untuk masa depan generasi muda. Banyak keluarga memilih sekolah umum unggulan atau madrasah terpadu karena melihatnya sebagai tiket menuju pendidikan tinggi dan pasar kerja modern. Otoritas guru pendidikan umum juga diperkuat oleh struktur formal seperti sertifikasi, pelatihan profesional, dan evaluasi kinerja (Huda et al., 2025). Hal ini memberikan legitimasi berbeda dibandingkan dengan otoritas ulama yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam.

Kontestasi antara dua otoritas keilmuan ini terlihat jelas dalam perdebatan tentang arah pendidikan Aceh. Sebagian pihak menilai bahwa pendidikan umum perlu memperkuat aspek moral dan spiritual agar tidak melahirkan generasi yang sekuler, sementara pihak lain menilai dayah perlu memperbaharui kurikulum agar

lulusan mereka mampu bersaing dalam dunia global. Dalam ruang sosial masyarakat, kontestasi ini sering muncul dalam bentuk diskusi tentang "pendidikan terbaik", apakah orang tua harus memprioritaskan dayah atau sekolah umum. Diskursus ini mencerminkan ketegangan epistemik antara nilai-nilai religius dan tuntutan modernitas, yang keduanya dianggap penting namun sering dipandang bertentangan.

Fenomena kontestasi juga tampak dalam sikap masyarakat terhadap legitimasi ilmiah. Ilmu agama dipandang sebagai ilmu yang mulia dan bernilai akhirat, sehingga ulama dayah dianggap memiliki otoritas moral tertinggi. Sebaliknya, ilmu modern dipandang sebagai alat untuk mencapai kehidupan dunia yang lebih baik. Perbedaan cara memandang ilmu ini mempengaruhi keputusan pendidikan keluarga Aceh secara signifikan. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya menguasai kedua bentuk ilmu, tetapi tidak semua lembaga mampu menyediakan integrasi tersebut (Sari et al., 2019). Hal ini menimbulkan dilema pilihan: apakah lebih penting menjadi ahli agama atau memiliki karir profesional modern?

Di sisi lain, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa otoritas ulama dayah dan guru pendidikan umum tidak selalu bersifat kompetitif; keduanya sering saling melengkapi. Banyak guru sekolah umum yang mengaji kepada ulama dayah untuk memperkuat pemahaman agama, sementara banyak santri dayah mengikuti kursus atau kelas tambahan untuk meningkatkan literasi akademik mereka (Erawadi & Setiadi, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan integratif dalam masyarakat Aceh yang mengakui pentingnya dua otoritas tersebut. Dalam konteks ini, figur pendidik ideal adalah yang mampu menggabungkan kedalaman spiritual dengan kecakapan akademik, meski kenyataannya tidak semua tokoh pendidikan dapat memenuhi dua kompetensi tersebut.

Perubahan kebijakan pemerintah Aceh melalui otonomi khusus juga mempengaruhi dinamika otoritas ini. Penguatan lembaga dayah melalui BPPD, program modernisasi, dan dukungan anggaran membuat ulama dayah semakin memiliki legitimasi formal dalam sistem pendidikan regional (Erawadi & Setiadi, 2024). Pada saat yang sama, pemerintah masih mengandalkan standar nasional pendidikan umum untuk menyiapkan tenaga kerja masa depan. Dualitas kebijakan ini menciptakan ruang baru bagi kolaborasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persaingan dalam hal alokasi sumber daya dan legitimasi publik. Masyarakat memandang kedua jalur ini sebagai pilihan strategis, tetapi tetap menilai bahwa keberhasilan pendidikan bergantung pada keseimbangan antara moralitas dan kompetensi akademik.

Persepsi masyarakat terhadap otoritas keilmuan juga dipengaruhi oleh fenomena digitalisasi. Ulama dayah yang aktif berdakwah melalui media sosial mendapatkan legitimasi baru dari generasi muda, sementara guru pendidikan umum yang menguasai teknologi pembelajaran dianggap lebih relevan dalam era digital. Namun digitalisasi juga membawa tantangan: munculnya ustaz instan atau influencer pendidikan yang tidak memiliki otoritas keilmuan yang kuat (Enhas et al., 2023). Masyarakat Aceh semakin kritis dalam menilai siapa yang benar-benar berkompeten, sehingga otoritas tradisional maupun modern dituntut

menunjukkan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral.

Otoritas ulama dayah dan guru pendidikan umum dalam masyarakat Aceh bukanlah persoalan siapa yang lebih unggul, tetapi bagaimana keduanya dapat saling melengkapi untuk menciptakan pendidikan yang utuh dan bermakna. Generasi Aceh masa depan membutuhkan figur yang dapat membimbing mereka secara spiritual, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi kompetisi akademik dan profesional di tingkat global. Ke depan, sinergi antara ulama dan guru perlu dikembangkan melalui kolaborasi kurikulum, pelatihan lintas disiplin, dan penguatan ekosistem pendidikan yang menghargai kesatuan ilmu. Melalui harmonisasi otoritas keilmuan ini, Aceh dapat membangun model pendidikan yang berakar kuat pada identitas budaya namun tetap visioner dalam menghadapi tuntutan zaman.

Tantangan Ketersediaan Tenaga Ahli, Profesionalisme Guru, dan Standar Mutu pada Kedua Sistem Pendidikan

Tantangan ketersediaan tenaga ahli dalam ekosistem pendidikan Aceh menjadi isu yang terus mengemuka seiring transformasi sosial, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung cepat. Baik lembaga dayah maupun sekolah umum menghadapi tekanan untuk menyesuaikan kapasitas internal dengan kebutuhan kompetensi abad ke-21. Kesenjangan sumber daya manusia muncul akibat perubahan profil peserta didik yang semakin heterogen, mobilitas global yang meningkat, serta ekspektasi masyarakat yang mengarah pada standar mutu yang lebih tinggi (Huda et al., 2025). Dalam konteks ini, persoalan tenaga ahli bukan sekadar berkaitan dengan jumlah pendidik, melainkan mencakup kualitas, rekam jejak akademik, integritas profesi, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan pengetahuan. Persoalan ini menjadi titik awal bagi analisis hubungan antara profesionalisme guru dan standar mutu pendidikan pada dua sistem yang memiliki karakter historis dan epistemologis berbeda.

Pada level makro, ketersediaan tenaga ahli di dayah umumnya sangat bergantung pada tradisi internal pembinaan kader ulama. Model regenerasi berbasis genealogis–keilmuan menjadikan proses kaderisasi berjalan secara organik, namun tidak selalu menghasilkan jumlah tenaga yang memadai untuk menjawab tuntutan pembelajaran kontemporer (Arifin et al., 2025). Meski demikian, kualitas penguasaan ilmu-ilmu keagamaan klasik seperti fikih, tafsir, dan tasawuf relatif kuat, tetapi keterampilan metodologis dan pedagogis modern sering kali mengalami keterlambatan. Di sisi lain, sekolah umum memiliki akses lebih luas terhadap distribusi guru melalui mekanisme sertifikasi, rekrutmen pemerintah, dan program pengembangan profesi, namun kualitas implementatifnya tidak selalu merata (Mustofa et al., 2025). Dengan demikian, kedua sistem menghadapi tantangan unik: dayah kekurangan tenaga ahli dalam mata pelajaran modern, sedangkan sekolah umum kekurangan pendidik yang kuat dalam literasi keagamaan yang kontekstual.

Profesionalisme guru pada kedua sistem pendidikan ini juga mengalami dinamika yang berbeda. Di dayah, profesionalisme sering dimaknai sebagai keteladanan moral, kedalaman spiritual, dan keluhuran adab dalam membimbing

santri. Sementara itu, standar profesionalisme guru umum bersifat lebih administratif dan teknokratis, diukur melalui sertifikasi, kualifikasi akademik, dan keterampilan pedagogis terukur. Perbedaan paradigma ini menciptakan rupa profesionalisme yang berlapis dan saling bertolak. Namun, perkembangan pendidikan modern menuntut adanya jembatan antara kedua konsep tersebut. Seorang teungku dayah idealnya menguasai metodologi pembelajaran yang adaptif, sementara seorang guru umum idealnya memiliki kecakapan spiritual dan sensitivitas nilai-nilai lokal sehingga proses pendidikan lebih menyeluruh. Pada titik ini, profesionalisme tidak dapat dilihat hanya dari sisi administrasi atau moralitas, tetapi harus mengintegrasikan keduanya (M. Fajar Sidik et al., 2024).

Tantangan peningkatan profesionalisme semakin kompleks ketika dikaitkan dengan transformasi digital dan globalisasi. Guru sekolah umum dituntut untuk menguasai teknologi pembelajaran, literasi data, dan penilaian berbasis kompetensi (Effendy et al., 2024). Sementara itu, banyak teungku dayah mulai berhadapan dengan tuntutan digitalisasi kitab, literasi informasi global, dan kebutuhan untuk menjelaskan isu-isu keagamaan yang semakin kompleks. Namun, kesenjangan akses, minimnya pelatihan terstruktur, serta terbatasnya kurikulum berbasis teknologi di dayah membuat adaptasi berjalan tidak merata (Nasution et al., 2019). Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan profesionalisme pada dua sistem pendidikan bukan lagi sekadar persoalan internal, tetapi terkait dengan perubahan sistemik yang mempengaruhi cara pengetahuan diproduksi, disampaikan, dan dipahami.

Standar mutu pendidikan menjadi titik pertemuan antara kedua sistem meskipun pendekatannya berbeda. Di sekolah umum, standar mutu diukur melalui akreditasi, kelulusan asesmen nasional, capaian literasi–numerasi, serta implementasi kurikulum merdeka yang berfokus pada kompetensi. Sementara itu, dayah menilai mutu melalui penguasaan kitab kuning, ketekunan ibadah, akhlak santri, dan legitimasi sosial alumni di masyarakat (M. Fajar Sidik et al., 2024). Keduanya mencerminkan orientasi epistemik yang sah, tetapi tidak selalu kompatibel. Tantangan muncul ketika masyarakat Aceh mengharapkan anak-anak mereka memiliki kekuatan religius sekaligus kapasitas akademik modern. Ketidaksinkronan standar mutu inilah yang melahirkan kontestasi, fragmentasi, bahkan perpindahan siswa antar sistem pendidikan demi memperoleh keseimbangan yang belum tercapai secara institusional.

Persoalan ketersediaan tenaga ahli semakin terasa pada mata pelajaran integratif seperti sains keislaman, etika teknologi, ekonomi syariah, dan kajian sosial-kultural Aceh. Kedua sistem pendidikan masih kekurangan pendidik yang mampu menjembatani disiplin agama dan sains. Guru umum sering tidak memiliki kedalaman epistemologi Islam yang memadai, sementara teungku dayah tidak selalu memiliki latar akademik formal pada bidang ilmiah modern. Kekosongan ini membuat narasi pendidikan integratif berjalan lambat, padahal masyarakat Aceh sebagai wilayah yang memiliki warisan budaya Islam yang kuat, sangat membutuhkan model pembelajaran yang sejalan dengan identitas keagamaannya sekaligus adaptif terhadap kemajuan zaman.

Kesenjangan kompetensi ini juga berdampak pada pola rekrutmen tenaga pengajar. Dayah biasanya merekrut alumni internal, menyebabkan homogenitas kompetensi yang kuat dalam aspek keagamaan tetapi lemah dalam perspektif

interdisipliner (D. M. Ali, 2024). Sebaliknya, sekolah umum merekrut guru dari berbagai latar belakang, tetapi kurang terintegrasi dengan kearifan lokal dan nilai-nilai Islam Aceh. Keduanya menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara spesialisasi dan relevansi kontekstual. Tanpa strategi rekrutmen berbasis kebutuhan jangka panjang, kedua institusi berisiko menghasilkan lulusan yang kompeten secara parsial, tetapi tidak sepenuhnya memadai untuk dunia yang semakin kompleks.

Intervensi kebijakan juga belum sepenuhnya merata. Program pengembangan profesi guru seperti PPG, diklat, dan pelatihan berbasis kurikulum merdeka lebih banyak menyasar sekolah umum, sementara lembaga dayah memiliki pelatihan yang sifatnya otonom dan tidak selalu terstandardisasi. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara tuntutan kebijakan pendidikan modern dengan mekanisme pembinaan internal dayah. Tantangan terbesar adalah bagaimana menghadirkan skema pelatihan lintas sistem yang tidak menyalahi karakteristik epistemologi dayah tetapi tetap memberikan penguatan kompetensi pedagogis dan digital. Inilah ruang kebijakan yang masih sangat terbuka dan strategis untuk dijembatani.

Dengan munculnya standar global mengenai kualitas pendidikan, indikator mutu kini mencakup kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan literasi data. Namun, banyak guru dari kedua sistem belum memiliki kesempatan untuk memperkuat kompetensi tersebut secara berkelanjutan. Di dayah, metodologi halaqah yang tradisional tidak dirancang untuk memupuk keterampilan abad ke-21 secara eksplisit. Di sekolah umum, beban administratif yang tinggi sering menghambat guru untuk mengembangkan praktik pembelajaran mendalam. Tantangan ini bersifat struktural dan tidak dapat diatasi hanya melalui pelatihan sporadis, melainkan membutuhkan restrukturisasi ekosistem pembelajaran yang mendukung kreativitas pedagogis.

Keterbatasan fasilitas dan kesenjangan infrastruktur juga memperbesar tantangan profesionalisme. Banyak dayah beroperasi dengan sumber daya yang relatif terbatas, khususnya terkait laboratorium sains, perangkat teknologi, dan akses internet stabil. Di sisi lain, meskipun sekolah umum biasanya memiliki fasilitas lebih lengkap, distribusinya tidak merata, terutama di daerah pedesaan Aceh. Fasilitas yang tidak memadai membatasi ruang gerak guru dalam menciptakan pembelajaran inovatif, dan secara tidak langsung mempengaruhi kualitas lulusan. Hal ini mempertegas bahwa persoalan mutu bukan hanya terletak pada individu tenaga pendidik, tetapi juga kondisi institusional yang mendukung mereka.

Pada tataran sosial, persepsi masyarakat mengenai kredibilitas guru dayah dan guru sekolah umum ikut mempengaruhi dinamika profesionalisme. Guru dayah sering dipandang sebagai figur karismatik, pemegang otoritas moral, dan penjaga warisan keilmuan Islam Aceh, sementara guru sekolah umum dipersepsikan sebagai profesional formal yang menguasai kompetensi akademik modern (Basri et al., 2024). Kedua persepsi tersebut mengandung validitas, tetapi juga dapat menciptakan jarak kultural antar sistem pendidikan. Tantangan terbesar adalah bagaimana membangun persepsi kolaboratif sehingga profesionalisme guru tidak dilihat dalam kerangka kompetisi identitas, tetapi

dalam kerangka kontribusi bersama terhadap peningkatan kualitas pendidikan Aceh secara menyeluruh.

Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan Aceh tidak dapat dicapai melalui pendekatan parsial. Ketersediaan tenaga ahli, profesionalisme guru, dan standar mutu merupakan tiga elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-budaya Aceh. Upaya transformasi harus menempatkan kedua sistem—dayah dan pendidikan umum—sebagai mitra strategis dalam menghadapi perubahan zaman. Integrasi pelatihan, kolaborasi kurikulum, pertukaran tenaga ahli, dan penguatan riset pendidikan lokal dapat menjadi fondasi untuk membangun mutu pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, tantangan yang ada bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih responsif, inklusif, dan berkarakter Aceh.

Strategi Integrasi dan Harmonisasi Kompetensi Religius–Akademik bagi Masa Depan Pendidikan Aceh

Perdebatan mengenai bagaimana mengintegrasikan kompetensi religius dan akademik dalam sistem pendidikan Aceh terus menjadi agenda strategis di tengah dinamika globalisasi, transformasi digital, dan perubahan sosial yang cepat. Aceh memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang menempatkan Islam sebagai identitas kultural, politik, dan intelektual, yang secara tradisional dijaga melalui institusi dayah (Karimuddin, 2017). Sementara itu, perkembangan pendidikan umum menghadirkan tuntutan baru terkait literasi modern, sains, teknologi, dan keterampilan abad ke-21 yang tidak dapat diabaikan (N. Ali, 2020). Dalam konteks ini, upaya harmonisasi dua kompetensi tersebut bukan sekadar kebutuhan pedagogis, tetapi menjadi prasyarat fundamental untuk menciptakan generasi Aceh yang mampu menjaga jati diri sekaligus memenangkan kompetisi global.

Secara umum, strategi integrasi harus dimulai dengan pemahaman ontologis bahwa ilmu agama dan ilmu umum bukan dua entitas yang saling meniadakan, tetapi dua jalur pengetahuan yang dapat saling memperkaya. Dalam sejarah intelektual Islam klasik, relasi keduanya bersifat komplementer: ulama menguasai logika, astronomi, kedokteran, hingga matematika tanpa merasa terlepas dari identitas keagamaan (Utari et al., 2025). Pandangan integratif inilah yang perlu dihidupkan kembali dalam konteks Aceh. Pendidikan modern membutuhkan pendekatan epistemologis yang memadukan nilai, etika, rasionalitas, dan spiritualitas. Tanpa landasan filosofis ini, integrasi sering berhenti pada level teknis, bukan pada transformasi paradigma.

Pada level kurikulum, harmonisasi kompetensi religius–akademik dapat dilakukan melalui desain kurikulum interdisipliner yang menghubungkan teori agama dengan fenomena kontemporer (N. Ali, 2019). Misalnya, materi akhlak dapat dikaitkan dengan literasi digital, pembangunan karakter, dan etika bermedia; materi fikih dapat disinergikan dengan isu lingkungan, ekonomi syariah, serta kesehatan masyarakat; sementara ilmu sains dan sosial dapat ditopang oleh nilai ketauhidan, integritas, dan keadilan. Kurikulum integratif harus menghindari polarisasi "agama–umum" dan bergerak menuju "mata pelajaran bercorak nilai"

yang menempatkan agama sebagai fondasi moral dan akademik sebagai instrumen pemberdayaan sosial (Anjaludin & Pratama, 2025).

Integrasi yang kuat juga memerlukan pendekatan pedagogis inovatif berbasis pembelajaran mendalam (deep learning). Guru perlu mengembangkan pengalaman belajar yang tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga kemampuan bernalar kritis, refleksi spiritual, dialog antarpengetahuan, dan pemecahan masalah nyata (Arifin et al., 2025). Model pembelajaran proyek (PjBL), Discovery Learning, dan Contextual Teaching and Learning (CTL) memungkinkan peserta didik menghubungkan nilai-nilai religius dengan situasi nyata, seperti pengelolaan sampah, ekonomi mikro, kesehatan mental, dan teknologi. Dengan demikian, agama tidak dipahami sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai prinsip hidup yang berinteraksi dengan realitas sosial.

Dalam konteks kelembagaan, strategi harmonisasi harus didorong melalui kolaborasi antara dayah dan sekolah umum sebagai mitra, bukan entitas yang berada dalam persaingan ideologis. Bentuk kolaborasi dapat berupa pertukaran tenaga ahli, joint training untuk guru agama dan guru umum, penyusunan modul integratif, dan forum ilmiah bersama yang membangun kultur saling belajar. Dayah dapat memperkuat dimensi spiritualitas, literasi kitab klasik, dan adab, sementara sekolah umum dapat memperkaya aspek sains, teknologi, dan pendekatan pedagogis modern. Kolaborasi ini dapat menciptakan "jembatan epistemik" yang memperkecil jarak keilmuan dan meminimalkan polarisasi sosial.

Untuk mendukung strategi tersebut, reformasi profesionalisme guru menjadi sangat penting. Penguatan kompetensi guru tidak hanya menyasar dimensi teknis pembelajaran, tetapi juga kapasitas berpikir interdisipliner dan kepekaan nilai moral (D. M. Ali, 2024). Guru agama perlu memiliki literasi global, kemampuan membaca isu kontemporer, dan teknik pembelajaran aktif; sebaliknya, guru umum perlu memahami etika Islam, kearifan lokal Aceh, dan prinsip-prinsip pendidikan berbasis akhlak. Pelatihan guru yang bersifat integratif perlu dirancang secara sistematis melalui program PPG, diklat, dan workshop kolaboratif yang melibatkan akademisi, ulama, dan praktisi pendidikan.

Strategi integrasi juga harus menyentuh aspek evaluasi dan penilaian. Sistem asesmen integratif tidak hanya mengukur capaian pengetahuan akademik, tetapi juga perkembangan karakter, kemampuan reflektif, dan keterlibatan sosial. Instrumen asesmen berbasis portofolio, proyek, serta observasi perilaku dapat melengkapi tes kognitif (M. Chalis et al., 2024). Dengan demikian, keberhasilan pendidikan Aceh tidak lagi ditentukan oleh nilai ujian semata, tetapi oleh kualitas kepribadian dan kompetensi holistik peserta didik. Evaluasi semacam ini lebih sesuai dengan visi masyarakat Aceh yang menginginkan generasi berilmu, berakhlak, dan berkontribusi.

Di tingkat komunitas, harmonisasi kompetensi religius–akademik memerlukan dukungan masyarakat sebagai pemilik nilai budaya Aceh. Masyarakat harus diposisikan sebagai mitra aktif dalam pengembangan pendidikan melalui peran komite sekolah, majelis guru, tokoh adat, dan alumni. Kolaborasi masyarakat dapat memperkuat pendidikan karakter, menumbuhkan kemandirian ekonomi pesantren, serta membuka ruang praktik sosial bagi siswa. Dukungan masyarakat akan menciptakan ekosistem pendidikan yang stabil, berkelanjutan, dan memiliki legitimasi budaya yang kuat, sebuah faktor kunci keberhasilan integrasi dua

kompetensi yang selama ini dipisahkan oleh struktur sistem pendidikan (Enhas et al., 2023).

Dalam kerangka kebijakan publik, pemerintah Aceh perlu merumuskan regulasi yang secara eksplisit mendorong integrasi kompetensi religius–akademik. Hal ini mencakup penyusunan standar mutu pendidikan berbasis nilai Islam, insentif bagi kolaborasi lintas lembaga, serta penyelarasan kurikulum dayah dengan standar kompetensi minimal nasional tanpa menghilangkan karakter khasnya. Kebijakan pendidikan Aceh tidak boleh berhenti pada retorika harmonisasi, tetapi harus menghasilkan instrumen operasional yang dapat dievaluasi secara berkala. Reformasi kebijakan yang terarah akan menjadi payung sistemik bagi upaya integrasi di tingkat sekolah dan dayah.

Teknologi digital membuka peluang besar untuk menghubungkan kompetensi religius dan akademik. Pengembangan platform belajar interaktif berbasis nilai Islami, digitalisasi kitab kuning, pelajaran sains berbasis wahyu, hingga e-learning kolaboratif antara dayah dan sekolah umum dapat mempercepat integrasi pengetahuan. Teknologi juga membantu guru mengakses referensi global dan mengembangkan praktik pembelajaran inovatif (Huda et al., 2025). Namun, pemanfaatan teknologi harus disertai kontrol etika dan literasi digital yang kuat agar tidak berpotensi melemahkan nilai religius yang menjadi identitas pendidikan Aceh.

Integrasi kompetensi religius–akademik pada akhirnya harus berorientasi pada pembentukan profil lulusan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Lulusan yang ideal bukan hanya yang memiliki hafalan kuat dan kemampuan akademik tinggi, tetapi yang mampu mengambil keputusan etis, berkomunikasi lintas budaya, berpikir kritis, kreatif, serta memiliki sensitivitas sosial. Profil ini sangat penting untuk menjawab tantangan industri, perubahan ekonomi, dan dinamika global (M. Chalis et al., 2024). Generasi Aceh yang mampu menggabungkan kedalaman spiritualitas dengan kecakapan akademik akan menjadi modal utama untuk memimpin perubahan di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional.

Strategi integrasi dan harmonisasi kompetensi religius–akademik merupakan proyek besar yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Diperlukan sinergi antara dayah, sekolah umum, pemerintah, masyarakat, dan dunia akademik untuk membangun sistem pendidikan Aceh yang berkelanjutan, adaptif, dan berakar pada identitas budaya lokal. Integrasi bukan berarti mencampuradukkan tanpa arah, tetapi menyatukan dua kekuatan besar yakkni ilmu agama dan ilmu modern secara proporsional dan kontekstual. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, pendidikan Aceh tidak hanya akan melahirkan generasi cerdas dan berakhlak, tetapi juga generasi yang mampu menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa kontestasi antara Dayah dan pendidikan umum di Aceh bukan semata-mata persoalan dikotomi kurikulum, tetapi lebih merupakan refleksi dari dinamika sosial, historis, dan ideologis yang membentuk cara masyarakat memahami relasi antara ilmu agama dan sains modern. Meskipun

secara ideal kedua sistem pendidikan ini dapat membangun harmoni kompetensi religius–akademik, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat jarak struktural dan kultural yang menyebabkan orientasi pendidikan berjalan secara paralel dan kurang saling mendukung. Temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada perbedaan epistemologis, tetapi pada belum optimalnya integrasi model pembelajaran, desain kurikulum, dan kerangka kelembagaan yang mampu menjembatani keunggulan masing-masing sistem.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada wacana penguatan tata kelola pendidikan di Aceh melalui rekomendasi untuk membangun model integrasi yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi masa depan. Harmonisasi Dayah dan pendidikan umum memerlukan langkah sistemik mulai dari rekonstruksi kurikulum integratif, peningkatan kapasitas guru lintas disiplin, hingga penciptaan ekosistem belajar yang menyatukan nilai keislaman dan kecakapan akademik secara seimbang. Temuan ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai pendidikan Islam di wilayah berbasis syariat, tetapi juga menawarkan kerangka praktis bagi pembuat kebijakan, pimpinan lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan untuk merancang model pendidikan Aceh yang holistik, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan era kontemporer.

Referensi

Ali, D. M. (2024). *Manajemen Pendidikan Pesantren Tradisional, Modern Dan Global*. Tahta Media Group.

Ali, N. (2019). Integrative Curriculum of Religion and Science at Special Pesantren for University Students. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, *20*(1), 95–122. https://doi.org/10.18860/ua.v20i1.6353

Ali, N. (2020). Integrating the Program of School Curriculum and Pesantren Education: Case Study on the Pesantren Located in the Madrasah at Malang City. *Abjadia*, *5*(1), 1. https://doi.org/10.18860/abj.v5i1.9527

Anjaludin, & Pratama, A. I. (2025). Integration of Pesantren Curriculum with Digital Technology: Challenges and Opportunities in Islamic Education. *Proceeding of International Conference on Islamic Boarding School*, *2*(1). https://doi.org/10.61159/icop.v2i1.594

Arifin, N., Ochocka, J., & Tabroni, I. (2025). Islamic Education Innovation: Integration of Pesantren and School Curriculum. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, *14*(02), 353–364. https://doi.org/10.30868/ei.v14i02.8271

Azhari, M., & Jailani, J. (2023). Kontribusi Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam Pengembangan Kurikulum Dayah Salafiyah Terpadu. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, *4*(1), 26–42. https://doi.org/10.53802/fitrah.v4i1.131

Basri, B., Wahidah, W., & Mahyiddin, M. (2024). Inovasi Lembaga Pendidikan Islam Aceh dalam Mempersiapkan Generasi Qur'ani di Era Digital. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 32–50. https://doi.org/10.47498/tadib.v16i1.3055

Buto, Z. A., & Hafifuddin, H. (2022). The Innovation of Dayah Curriculum in Meeting the National Education Standards in Aceh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, *45*(2), 305–325. https://doi.org/10.30821/miqot.v45i2.822

Effendy, M. H., Putikadyanto, A. P. A., & Rizam, M. M. (2024). Implementation of Islamic Education Curriculum Management Based on Pesantren Local Wisdom in the Era of Disruption. *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)*, *7*(1), 119–130. https://doi.org/10.19105/re-jiem.v7i1.10607

Enhas, M. I. G., Zahara, A. N., & Basri, B. (2023). Sejarah, Transformasi, dan Adaptasi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, *13*(3), 289–310. https://doi.org/10.33367/ji.v13i3.4457

Erawadi, E., & Setiadi, F. M. (2024). Transformation of Traditional Islamic Education: Dayah as a Modern Educational Institution in Post-Conflict Aceh. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, *9*(2), 225–246. https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i2.10110

Huda, V. S., Kholifa, A. K., & Pratama, M. R. (2025). Integrasi Pendidikan Islam Dan Sain Dalam Dunia Pasantern Di Era 4.0. *Arsy*, *9*(2), 135–149. https://doi.org/10.32492/arsy.v9i2.9205

Idris, M. A. (2020). Peran Pendidikan Dayah dalam Pembentukan Karakter Pemuda Aceh (Studi Kasus di Aceh Tenggara). *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 61–70. https://doi.org/10.47498/tadib.v12i01.337

Imawan, D. H. (2022). The Contribution of Shaikh Abdurrauf As-Singkili to the Establishment of Islamic Law in the Kingdom of Aceh Darussalam in the 17th Century AD. *Millah: Journal of Religious Studies*, 797–820. https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art7

Inayatillah, I. (2022). Dayah Modern: Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Pesantren Terpadu serta Relevansinya dengan Sejarah Pendidikan Islam di Aceh. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 142–152. https://doi.org/10.47498/tadib.v14i2.1820

Karimuddin, F. (2017). Pemikiran Prof. H. Hasbi Amiruddin, MA tentang Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan Agama Islam Masyarakat Aceh. *Jurnal At-Tarbiyyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, *3*(1), 1–27.

M. Chalis, M. C., Suhaimi, S., & Sulaiman, S. (2024). The Implementation of Religious Moderation in the Quran and Hadith Learning At Islamic Senior High Schools in Aceh. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, *7*(1), 1–18. https://doi.org/10.22373/jie.v7i1.19696

M. Fajar Sidik, Vrisko Putra Vachruddin, Evi Fatimatur Rusydiyah, Ani Setya Pertiwi, & Mugthi Alintya Darmawan. (2024). Conceptualization of the Integrated Islamic Religious Education Curriculum: A Literature Study at Imam Hatip Schools Turkey and MAN Insan Cendekia Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *21*(1), 111–130. https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.7617

Musaddad, A., Sudarsono, S., & F.s, N. A. (2025). Konvergensi Kurikulum Pendidikan Agama dan Sekuler dalam Pendidikan Islam di Indonesia: Analisis Literatur. *Al Ma'ruf: Journal Of Islamic Education*, *1*(1), 40–58.

Mustofa, K., Hernawati, S., & Rofingah, M. N. S. (2025). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama di Pesantren, Sekolah dan Madrasah. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, *12*(1), 72–79. https://doi.org/10.30599/jxhr7g68

Nasution, I. F. A., Miswari, M., & Sabaruddin, S. (2019). Preserving Identity through Modernity: Dayah al-Aziziyah and Its Negotiations with Modernity in Aceh. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, *3*(2), 211–232. https://doi.org/10.21009/hayula.003.2.06

Razali, R. R., Nafis, A., & Nasir, M. (2024). Transformasi Pendidikan Dayah Dalam Menghadapi Dinamika Era Globalisasi: Analisis LPI MUDI Mesjid Raya Samalanga. *Jurnal At-Tarbiyyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, *10*(2), 98–115. https://doi.org/10.54621/jiat.v10i2.961

Sari, D. P., Yahya, M., & Nurdin, S. (2019). Motivasi Orang Tua dalam Memilih Sekolah Dasar Islam Terpadu bagi Anak (Penelitian pada Orang Tua Murid di SDIT Nurul Ishlah Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh). *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling*, *4*(2). https://jim.usk.ac.id/pbk/article/view/10069

Solichin, M. (2015). Perkembangan Pendidikan Meunasah dan Dayah di Aceh. *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, *1*(1), 124–151. https://doi.org/10.26594/dirasat.v1i1.509

Subakat, R. (2018). Peranan Dayah dan Meunasah di Aceh dalam Membentuk Masyarakat Religius. *Jurnal As-Salam*, *1*(3), 68–79.

Utari, D., Abidin, M., Yuniar, Y., & Junaidah, J. (2025). Integration of General Knowledge and Religion Policy for the Emergence of Integrated Islamic Schools. *International Journal of Education and Literature*, *4*(1), 267–278. https://doi.org/10.55606/ijel.v4i1.217